



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan terhadap Tiongkok
terkait Kebijakan Pelarangan *Hallyu* Periode 2016 -
September 2021**

Skripsi

Oleh

Erika Erviany

6091801170

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan terhadap Tiongkok
terkait Kebijakan Pelarangan *Hallyu* Periode 2016 -
September 2021

Skripsi

Oleh

Erika Erviany
6091801170

Pembimbing
Dr. Atom Ginting Munthe, M.S

Bandung
2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Erika Erviany
Nomor Pokok : 6091801170
Judul : Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan terhadap
Tiongkok terkait Kebijakan Pelarangan *Hallyu* Periode
2016 – September 2021

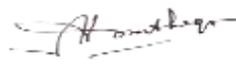
Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Selasa, 18 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

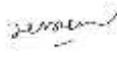
Ketua sidang merangkap anggota

Anggia Valerisha, S.IP., M.Si. : 

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. : 

Anggota

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erika Erviany

NPM : 6091801170

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan terhadap Tiongkok
terkait Kebijakan Pelarangan *Hallyu* Periode 2016 - September 2021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2022



Erika Erviany

ABSTRAK

Nama : Erika Erviany

NPM : 6091801170

Judul : Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan terhadap Tiongkok terkait Kebijakan Pelarangan *Hallyu* Periode 2016 - September 2021

Korea Selatan merupakan salah satu negara di dunia yang secara aktif menggunakan kebudayaan sebagai alat *soft power* negaranya berupa *hallyu* terdiri dari produk kebudayaan non tradisional seperti musik melalui *K-pop*, film, serial televisi, acara hiburan, tren mode, dan gaya hidup untuk memenuhi kepentingan negara dan melaksanakan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Pada tahun 2016, Tiongkok menjatuhkan sanksi pelarangan *hallyu* setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat menyetujui program pengembangan *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* dan membuat hubungan kedua negara menjadi menegang serta menyebabkan *hallyu* tidak dapat diimpor ke Tiongkok. Untuk melihat bagaimana upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam mengatasi pelarangan *hallyu* oleh Tiongkok dengan adanya perkembangan hubungan kebijakan pelarangan *hallyu*, maka dapat dilihat dari upaya diplomasi publik dengan instrumen *cultural diplomacy*, *advocacy*, dan *international broadcasting* yang dilakukan oleh Korea Selatan serta melalui perkembangan *hallyu* di Tiongkok hingga September 2021 untuk mengetahui kemungkinan kebijakan pelarangan *hallyu* dapat dihapuskan atau diperketat di masa yang akan datang. *Cultural diplomacy* melihat langkah Korea Selatan melalui kebijakan luar negeri *News Southern Policy (NSP)*. *International broadcasting* dengan melihat langkah promosi sejumlah artis SM dan YG *Entertainment* melalui kerjasama dengan aplikasi *Huya Live* dan *iQIYI* asal Tiongkok. *Advocacy* melalui upaya Korea Selatan dalam melayangkan keluhan di *World Trade Organization (WTO)* terhadap Tiongkok pada Maret 2017. Perkembangan pelarangan *hallyu* hingga September 2021 ditemukan sejumlah langkah pemerintah Tiongkok yang justru memperketat pelarangan *hallyu*.

Kata kunci: *Hallyu*, Korea Selatan, Tiongkok, Diplomasi Publik, *Cultural Diplomacy*, *International Broadcasting*, *Advocacy*

ABSTRACT

Name : Erika Erviany

Student ID : 6091801170

Title : *South Korea's Public Diplomacy Efforts towards China regarding The 2016 - September 2021 Hallyu Ban Policy*

South Korea is one of the countries in the world that actively uses culture as a tool of its country's soft power in the form of hallyu consisting of non-traditional cultural products such as music through K-pop, films, television series, entertainment programs, fashion trends, and lifestyles to fulfill the interests of the country and implement South Korea's foreign policy . In 2016, China imposed sanctions banning hallyu after South Korea and the United States agreed to the development program Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) and strained relations between the two countries and prevented hallyu from being imported into China. To see how South Korea's public diplomacy efforts in overcoming the hallyu ban by China with the development of the ban policy relations with hallyu , it can be seen from public diplomacy efforts with cultural diplomacy, advocacy, and international broadcasting instruments carried out by South Korea as well as through the development of hallyu in China until September 2021 to find out possible policies for banning hallyu. may be abolished or tightened in the future. Cultural diplomacy sees South Korea's move through the foreign policy of News Southern Policy (NSP). International broadcasting by looking at the promotion steps of a number of SM and YG artists Entertainment through collaboration with Huya Live and iQIYI applications from China. Advocacy through South Korea's efforts to file a complaint at the World Trade Organization (WTO) against China in March 2017. The development of the hallyu ban until September 2021 found a number of steps by the Chinese government that actually tightened the hallyu ban.

Keywords: Hallyu, South Korea, China, Public Diplomacy, Cultural Diplomacy, International Broadcasting, Advocacy.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan terhadap Tiongkok terkait Kebijakan Pelarangan *Hallyu* Periode 2016 - September 2021” dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara sebesar - besarnya kepada :

1. Keluarga yang sangat saya sayangi, Mama, Papa, dan Grasella yang selalu memberikan dukungan moril dan maupun materil dari dulu hingga sekarang demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
3. Ibu Prof. Sukawarsini Djelantik, M.Int.S, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)

4. Bapak Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berguna selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh teman - teman tercinta; Sekar, Tiara, Jocelyn, Mabel, Grace, Nathalie, dan teman - teman lain dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu sebagai teman penyusunan skripsi seperjuangan.
6. Bandung dan Jakarta sebagai tempat yang telah penulis kunjungi selama penyusunan skripsi ini
7. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman, sarana dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya bagi pihak-pihak terkait.

Bandung, 4 Januari 2022

Erika Erviany

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.2.1 Pembatasan Masalah	14
1.2.2 Perumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian	15
1.4 Kajian Literatur	16
1.5 Kerangka Teori	24
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	30
1.6.1 Metode Penelitian	30
1.7 Sistematika Pembahasan	31
BAB II PERKEMBANGAN HUBUNGAN DIPLOMASI KOREA SELATAN - TIONGKOK	33
2.1 Latar Belakang Masuknya <i>Hallyu</i> di Tiongkok	33
2.1.1 Antusiasme Masyarakat Terhadap <i>Hallyu</i> dan Popularitas <i>Hallyu</i> di Tiongkok	35
2.1.2 Tiongkok Sebagai Salah Satu Pasar <i>Hallyu</i> terbesar Bagi Korea Selatan	38
2.2 Hubungan Kerjasama Ekonomi antara Korea Selatan - Tiongkok	43

2.2.1 Pasar Ekonomi Korea Selatan dengan dimulainya Kerjasama Ekonomi dengan Tiongkok	47
2.2.2 Peran pemerintah Korea Selatan - Tiongkok dalam menjaga Kestabilan Kerjasama Bilateral	50
2.3 Hubungan Diplomasi Publik Korea Selatan - Tiongkok setelah Korea Selatan menyetujui program <i>Terminal High Altitude Area (THAAD)</i> dengan Amerika Serikat	59
2.3.1 Respons Tiongkok Atas disetujuinya THAAD oleh Korea Selatan	64
2.3.2 Sektor - Sektor Utama yang terkena Sanksi Ekonomi dan Pelarangan <i>Hallyu</i> oleh Tiongkok	68
BAB III UPAYA DAN ANALISIS DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN TERKAIT PELARANGAN <i>HALLYU</i> & PERKEMBANGAN <i>HALLYU</i> DI TIONGKOK HINGGA SEPTEMBER 2021	77
3.1 Upaya dan Langkah Korea Selatan dalam Menghadapi Pelarangan <i>Hallyu</i> oleh Tiongkok	77
3.1.1 Analisis Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan dengan Instrumen <i>Cultural Diplomacy</i>	83
3.1.2 Analisis Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan dengan Instrumen <i>International Broadcasting</i>	91
3.1.3 Analisis Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan dengan <i>Advocacy</i>	96
3.2 Perkembangan <i>Hallyu</i> di Tiongkok Hingga September 2021	98
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	108
4.1 Kesimpulan	108
4.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR SINGKATAN

CCTV	: <i>China Central Television</i>
NSP	: <i>New Southern Policy</i>
PDRR	: <i>Program Development and Risk Reduction</i>
THAAD	: <i>Terminal High Altitude Area Defense</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan keruntuhan Soviet dan diakhirinya masa perang dingin, sistem dunia internasional yang berbentuk bipolarism perlahan juga hilang. Hal ini menyebabkan perubahan yang terjadi secara besar - besaran dan meluas pada berbagai bidang ekonomi, politik, sosial, hingga berbagai struktur di banyak negara dunia.¹ Kemunculan revolusi teknologi dan informasi yang semakin berkembang mendorong terjadi perluasan dan perkembangan informasi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor pendorong besar dalam dimulainya globalisasi dunia. Pada era globalisasi, arus penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Era digitalisasi yang tercipta akibat terjadinya globalisasi dunia juga menyebabkan batasan - batasan berbagai negara perlahan kemudian menjadi tersamarkan (*borderless*). Hal ini tentu saja kemudian berdampak pada gaya hidup dan kegiatan komunikasi yang terjadi antar individu di dunia. Dengan terjadinya hal - hal yang telah disebutkan dan guna mencegah perluasan arus informasi yang dapat mengguncang struktur dan kedamaian berbagai negara diperlukan suatu hubungan dan interaksi yang dijalin antara satu negara dengan negara - negara lainnya. Dijalannya hubungan dan interaksi oleh satu negara dengan negara

¹ David S Alberts, Daniel S Papp, and Office Of The Assistant Secretary Of Defense Washington Dc Command And Control Research Program (Ccrp, *The Information Age: An Anthology on Its Impact and Consequences*. (United States: Office Of The Assistant Secretary Of Defense Washington Dc Command And Control Research Program (Ccrp, 1997), 2-4.

lainnya inilah yang kemudian menjadi awal kemunculan kegiatan diplomasi di dunia. Keberadaan kegiatan diplomasi sangat diperlukan oleh negara -negara dunia pada era digitalisasi dan diplomasi mengingat adanya kemungkinan bahwa arus informasi yang terlalu cepat berkembang pada era ini mampu memberikan dampak - dampak serius terhadap berbagai negara di dunia hingga dapat mengancam kondisi keamanan dan bahkan mampu menyebabkan gerakan - gerakan propaganda yang dapat berkembang pesat dan membahayakan kedaulatan sebuah negara. Dengan terjalinnya interaksi dan hubungan antara satu negara dengan negara - negara lainnya dalam diplomasi diharapkan mampu membantu berbagai negara di dunia untuk berusaha menyelesaikan permasalahan - permasalahan pada berbagai bidang seperti pertahanan, kedaulatan, ekonomi, dan politik yang terjadi pada era globalisasi ini.

Diplomasi menjadi wadah bagi negara untuk menentukan dan menjalankan kebijakan luar negerinya maupun sebagai tempat bagi berbagai negara untuk menjalin kerja sama dan aktivitas ekonominya.² Diplomasi terdiri dari beberapa jenis, seperti diplomasi preventif, diplomasi ekonomi dan perdagangan, diplomasi multilateral, diplomasi bilateral, dan diplomasi publik.³ Dengan melihat keadaan kehidupan masyarakat dunia pada era digitalisasi yang terjadi karena adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi ini, penyebaran informasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia tidak jarang menjadi penyebab utama terjadinya sebuah konflik

² Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi Antara Teori dan Praktik", (Yogyakarta: Graha ilmu, 2007), hal 191 - 192

³ Ibid. 191 - 192

maupun perpecahan yang dapat terjadi dengan melihat sejumlah informasi yang berkembang di internet maupun sosial media. Hal ini mengakibatkan penyebaran informasi dengan adanya perkembangan teknologi dan media menjadi salah satu aktor penting dalam kehidupan diplomasi dunia. Keberadaan media massa sebagai salah satu aktor penting dalam kegiatan diplomasi pada era globalisasi terjadi dengan penyebaran informasi terkait politik, ekonomi, dan keamanan negara yang berkembang pesat melalui internet sehingga hal tersebut juga secara perlahan mempengaruhi sejumlah kantor - kantor penyiar berita.⁴ Dengan masuknya globalisasi dalam dunia jurnalisme membuat salah satu faktor bagaimana media massa menjadi aktor penting dan fundamental dalam diplomasi.

Masuknya media massa sebagai aktor utama dalam diplomasi pada era globalisasi juga dapat dilihat dalam kemunculan diplomasi publik dalam dunia internasional. Diplomasi publik terdiri dari sembilan aktor diplomasi yaitu, pemerintahan negara, kelompok aktivis, para pelaku bisnis, kelompok profesi, kelompok religi, pendanaan, *private citizen*, serta opini publik yang diperoleh melalui media.⁵ Diplomasi publik pada era digitalisasi mampu dilakukan dengan lebih efektif dibandingkan dengan memakai jenis - jenis diplomasi tradisional lainnya. Hal ini dapat terjadi karena seiring dengan berkembangnya zaman, diplomasi publik dianggap lebih tepat untuk digunakan sebagai alat untuk membuka sejumlah peluang negosiasi dan

⁴ Eytan Gilboa, "Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects", *Diplomacy and Statecraft*, 12:2 (2001):hal 1- 5, DOI:10.1080/09592290108406201, diakses pada 20 Maret 2021.

⁵ Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi dalam Politik Global", (Bandung: Unpar Press 2016), 218.

kerjasama, memberikan kesempatan bagi para negara untuk menyampaikan pandangannya secara lebih praktis dan efisien, serta membantu menyelesaikan isu - isu politik global yang tidak dapat dilakukan dengan diplomasi tradisional.⁶ Selain itu pada era globalisasi sekarang ini, isu global yang sering terjadi di dunia cenderung bersifat *low - politics* yang muncul seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi dan media.⁷ Penggunaan diplomasi publik akan lebih tepat dalam menyelesaikan masalah dari isu - isu *low politics* tersebut. Kemunculan media dalam diplomasi publik juga menjadi tonggak awal kemunculan *soft power* dalam diplomasi dunia internasional. *Soft power* merupakan kekuatan atau kemampuan negara dalam upayanya untuk membentuk preferensi atau opini aktor lain terhadap negaranya sendiri melalui daya tarik yang dimiliki.⁸ Bukan melalui cara-cara koersif yang biasa disebut dengan *hard power*. Konsep “*soft power*” ini sendiri pertama kali diungkapkan oleh Joseph Nye pada awal tahun 1990-an.⁹ Perkembangan penggunaan *soft power* dalam diplomasi pada era globalisasi juga dinilai selaras dengan kondisi era digitalisasi yang cenderung akan arus informasi yang cepat. Penggunaan *soft power* juga dapat membantu negara dalam agenda pemenuhan kebutuhan negara dan untuk mencapai

⁶ Sukawarsini Djelantik, “Diplomasi Antara Teori dan Praktik”, (Yogyakarta: Graha ilmu 2007), hal 191 - 192

⁷ Nathan Olsen, “Blurring the Distinction Between “High” and “Low” Politics in International Relations Theory: Drifting Players in the Logic of Two-Level Games”, *International Relations and Diplomacy*, Vol. 5, No. 10 (2017): hal 637-642 DOI:: 10.17265/2328-2134/2017.10.005 , diakses pada 20 Maret 2021.

⁸ Gregory G. Holyk, “Paper Tiger? Chinese Soft Power in East Asia”, *Political Science Quarterly*, 2011, vol. 126, no. 2, hal 223-254 <http://www.jstor.org/stable/23056992> , 21 Maret 2021.

⁹ Ty Solomon, “The affective of soft power”, *European Journal of International Relations*, 2014, vol. 20(3), hal 722, <https://doi.org/10.1177/1354066113503479> , diakses pada 21 Maret 2021.

kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri negara tersebut. Kebudayaan merupakan salah satu komponen penting dalam *soft power*. Kebudayaan disini dapat berupa hasil kebudayaan tradisional seperti pakaian, senjata, maupun tradisi - tradisi tradisional dan juga hasil kebudayaan modern seperti serial televisi, musik, *fashion*, maupun kartun animasi. Penggunaan budaya sebagai salah satu alat dalam *soft power* secara perlahan kemudian menciptakan apa yang disebut dengan konsep *culture diplomacy* atau diplomasi budaya.

Penggunaan kebudayaan sebagai alat diplomasi menuai berbagai respons positif dari berbagai negara. Hal ini disebabkan karena pasalnya penggunaan kebudayaan sebagai alat diplomasi suatu negara dinilai dapat memberikan sejumlah dampak positif yang dapat membantu negara mencapai bukan hanya kepentingan nasionalnya namun juga mampu membawa sejumlah dampak lain yang akan membantu negara dalam memperlihatkan eksistensinya di dunia internasional. Selain itu penggunaan kebudayaan sebagai alat diplomasi publik juga dinilai dapat membuat suatu negara tidak perlu mengeluarkan yang besar seperti saat negara mengeluarkan dana untuk menginvestasikan sejumlah peralatan militer dan persenjataan. Penggunaan kebudayaan juga tidak jarang membuka peluang bagi para wisatawan asing untuk berkunjung dan mengenal lebih jauh kebudayaan dari negara tersebut. Bukti nyata dari keberhasilan penggunaan budaya sebagai alat diplomasi dapat dilihat dari Negara Korea Selatan yang pemerintahannya selalu mau mengupayakan dan mencantumkan unsur - unsur budaya bahkan dalam sejumlah serial televisi negara ginseng tersebut. Dampak dari tindakan pemerintah Korea Selatan tersebut mampu mengangkat angka

kunjungan wisatawan asing ke negara tersebut secara pesat. Hal ini juga menyebabkan peningkatan bidang *tourisme* dari negara tersebut yang juga berdampak pada semakin berkembangnya devisa Negara Korea Selatan.

Korea Selatan merupakan salah satu negara di dunia yang berhasil dalam menggunakan *soft power* negara secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan melalui penyebaran *hallyu* atau yang dikenal sebagai *korean wave* yang terus berkembang secara pesat dan berhasil menembus pasar global. Pemerintah Korea Selatan dinilai sangat piawai dalam memanfaatkan dan mengembangkan *hallyu* sebagai *soft power* negaranya. *Hallyu* merupakan suatu fenomena dimana berbagai produk *pop culture* dan gaya hidup Korea Selatan mulai dikenal dan berkembang hingga merambah ke pasar global. Produk - produk *pop culture* Korea Selatan juga meliputi musik melalui *K-pop*, film, serial televisi, serta melalui berbagai acara industri hiburan. Terciptanya istilah *hallyu* mulai dicetuskan sejak tahun 1999 oleh sejumlah wartawan lokal yang berasal dari Beijing.¹⁰ Istilah ini tercipta akibat keterkejutan mereka terhadap kesuksesan yang diperoleh oleh sejumlah serial televisi Korea Selatan di Tiongkok. Antusiasme masyarakat diluar Korea Selatan sangatlah besar hingga merambah ke negara - negara lain di Asia Timur seperti Tiongkok dan Jepang. Kesuksesan *hallyu* dimulai sejak tahun 1997 melalui serial televisi berjudul “*What is Love?*” yang penayangannya menyebar hingga ke Negara Tiongkok.¹¹ Sejumlah serial televisi

¹⁰ Korea Herald, “Remembering ‘Winter Sonata,’ the start of hallyu”, *Koreaherald.com*, 30 Desember 2011, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111230000497> , diakses pada 21 Maret 2021.

¹¹ Geun Lee, “A Theory of Soft Power and Korea’s Soft Power Strategy,” 2019, <https://doi.org/10.1080/10163270902913962> , diakses pada 21 Maret 2021

Korea Selatan lainnya yang membuat perkembangan *hallyu* semakin luas adalah *Winter Sonata* yang ditayangkan pada tahun 2002 dan sejumlah serial televisi Korea Selatan lainnya.¹² Tidak hanya dari sisi serial televisi, musik *K-pop* yang juga dipelopori oleh Seo Taiji *and Boys* pada pertengahan tahun 1990an juga ikut mewarnai awal keberhasilan kesuksesan *hallyu*.

Melihat keberhasilan *hallyu* yang datang dari berbagai macam negara, pemerintah Korea Selatan kemudian mulai mencoba peruntungannya di pasar global dengan menggunakan *hallyu* sebagai *soft power* negaranya. Pemerintah Korea Selatan mulai secara perlahan memberikan dukungannya dan menggunakan *hallyu* dalam berbagai kesempatan. Penggunaan *hallyu* sebagai *soft power* Korea Selatan dimulai pada saat pemerintah Korea Selatan mulai mendukung perkembangan serial televisi Korea Selatan dan tak jarang juga memasukkan sejumlah budaya tradisional dalam *hallyu*. Keseriusan Korea Selatan dalam menggunakan *soft power hallyu* sebagai langkah diplomasi publiknya juga terlihat sangat jelas pada program *First Basic Plan on Public Diplomacy* yang diciptakan oleh Presiden Moon Jae In pada tahun 2017 yang dicetuskan guna mencapai 4 tujuan utamanya yaitu meningkatkan status dan citra Korea Selatan menggunakan sumber budaya yang beragam, menyebarkan informasi yang akurat tentang Korea Selatan, mengkonstruksikan lingkungan yang ramah dan secara strategis menguntungkan kebijakan-kebijakan Korea Selatan, serta

¹² Korea Herald, "Remembering 'Winter Sonata,' the start of hallyu", *Koreaherald.com*, 30 Desember 2011, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111230000497>, diakses pada 21 Maret 2021.

pemberdayaan agen-agen diplomasi publik dan juga mendukung kolaborasi diantaranya.¹³

Keberhasilan dan kesuksesan *hallyu* tidak hanya bisa dirasakan oleh Korea Selatan saja, melainkan juga mampu dirasakan oleh sejumlah negara lainnya, tak terkecuali Tiongkok. Hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok pada mulanya dinilai berjalan cukup baik melihat bagaimana sejumlah serial televisi Korea Selatan juga mampu memperoleh posisi yang cukup baik di Tiongkok. Namun hal tersebut perlahan mulai terhapuskan terutama sejak pemerintah Korea selatan memberlakukan kebijakan *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*. *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* merupakan suatu sistem yang dibentuk guna meluncurkan rudal balistik berkekuatan pendek hingga menengah milik Korea Utara.¹⁴ Pemerintah Korea Selatan memberlakukan kebijakan ini dengan tujuan sebagai bentuk proteksi keamanan negara dari sejumlah serangan yang bisa saja menimpa negaranya¹⁵. Namun dengan diberlakukannya kebijakan *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* menimbulkan sejumlah pihak yang kemudian bersifat kontra dengan tindakan pemerintah Korea Selatan, dalam hal ini Negara Tiongkok. Timbulnya keresahan Tiongkok terhadap kebijakan ini kemudian berdampak pada hubungan diplomasi antara Korea Selatan dengan Tiongkok. Hal ini tentu saja dapat berdampak tidak baik

¹³ Kadir Ayhan, "Korea's Soft Power and Public Diplomacy Under Moon Jae-In Administration: A Window of Opportunity", *Hangang Network & Ministry of Foreign Affairs*, Desember 2017, https://www.researchgate.net/publication/322006838_Korea's_Soft_Power_and_Public_Diplomacy_Under_Moon_Jae-In_Administration_A_Window_of_Opportunity , diakses pada 21 Maret 2021.

¹⁴ James Griffiths and Joshua Berlinger, "What is THAAD?", *Edition.cnn.com*, 9 September 2016, <https://edition.cnn.com/2016/07/13/asia/what-is-thaad/index.html> , diakses pada 21 Maret 2021.

¹⁵ Ibid

bagi Korea Selatan mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara konsumen *hallyu* terbesar di dunia. Keresahan yang timbul dari sisi Tiongkok juga dirasakan bukan tanpa alasan. Pasalnya Tiongkok melihat tindakan tersebut sebagai bentuk ancaman yang diberikan oleh Korea Selatan yang bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk memperkuat kekuatan militer mereka.¹⁶

Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat mulai memperlihatkan ketegangannya sejak dimulainya era kepemimpinan Presiden Trump yang memicu timbulnya perang dagang antar kedua negara. Dengan rasa terancam yang mulai tumbuh dari sisi Tiongkok, membuat Korea Selatan harus menerima konsekuensinya. Korea Selatan harus dijatuhkan sanksi ekonomi oleh Tiongkok yang juga berdampak terhadap dilarangnya dan dipersulitnya *hallyu* untuk memasuki pasar Negara Tiongkok.¹⁷ Hal ini juga melahirkan suatu kebijakan yaitu *hallyu ban* yaitu kebijakan pelarangan terhadap masuknya sejumlah kegiatan industri hiburan seperti *k-pop*, serial televisi Korea Selatan, hingga sektor pariwisata Korea Selatan ke Tiongkok.¹⁸ Tiongkok melakukan pemberlakuan *hallyu ban* secara bertahap hingga akhirnya secara perlahan produk - produk *hallyu* asal Korea Selatan mulai kehilangan peminatnya di Tiongkok.

¹⁶ Lauren Teixeira, "K-Pop's Big China Problem Chinese stars are spinning off in their own orbit as politics gets in the way of profit", *Foreignpolicy.com*, 30 Juli 2019, <https://foreignpolicy.com/2019/07/30/k-pops-big-china-problem/> , diakses pada 21 Maret 2021.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ruben Diaz, "Here's A Timeline Of China's Ban On Korean Entertainment", *Charactermedia.com*, 8 Desember 2016, <https://charactermedia.com/heres-a-timeline-of-chinas-ban-on-korean-entertainment/> , diakses pada 21 Maret 2021.

Dengan Tiongkok sebagai salah satu pasar *hallyu* terbesar bagi Korea Selatan, maka pemerintah Korea Selatan mulai melakukan sejumlah upaya agar *hallyu* sebagai alat diplomasi publik Korea Selatan tidak kehilangan peminatnya di Negara Tiongkok. Upaya - upaya ini mulai diperjuangkan oleh Korea Selatan secara signifikan pada masa kepresidenan Presiden Moon Jae In. Sedangkan Tiongkok sebagai pihak yang menjatuhkan *hallyu ban* justru melihat hal ini sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali mengingat walaupun larangan tersebut diberikan kepada Korea Selatan, namun antusiasme masyarakat Tiongkok tetap saja lebih besar terhadap *hallyu* dibandingkan dengan industri hiburan lokal milik Tiongkok. Selain itu dengan masuknya *hallyu* ke Tiongkok juga memberikan sejumlah ide dan inspirasi bagi industri hiburan Tiongkok sehingga secara tidak langsung masuknya *hallyu* ke negara tersebut bukanlah sesuatu yang membawa dampak negatif.

1.2 Identifikasi Masalah

Hubungan diplomasi yang terjalin antara Tiongkok dan Amerika Serikat mulai memperlihatkan ketegangannya sejak dimulainya era kepemimpinan Presiden Trump yang memicu timbulnya perang dagang antar kedua negara. Dengan rasa terancam yang mulai tumbuh dari sisi Tiongkok, membuat Korea Selatan harus menerima konsekuensinya. Korea Selatan dijatuhkan sanksi ekonomi oleh Tiongkok yang juga berdampak terhadap dilarangnya dan dipersulitnya *hallyu* untuk memasuki pasar

domestik Tiongkok.¹⁹ Hal ini juga melahirkan suatu kebijakan yaitu *hallyu ban* yaitu kebijakan pelarangan terhadap masuknya sejumlah kegiatan industri hiburan seperti *k-pop*, serial televisi Korea Selatan, hingga sektor pariwisata Korea Selatan terhadap Tiongkok.²⁰ Tiongkok melakukan pemberlakuan pelarangan *hallyu* secara bertahap hingga akhirnya secara perlahan produk - produk *hallyu* milik Korea Selatan mulai kehilangan peminatnya di Tiongkok.

Pada saat kebijakan pelarangan *hallyu* pertama kali ditetapkan, terdapat beberapa larangan yang dijatuhkan oleh Tiongkok terhadap kegiatan industri hiburan Korea Selatan yang akan diekspor ke Tiongkok. Kebijakan - kebijakan ini antara lain, larangan masuknya sejumlah film asal Korea Selatan di sejumlah bioskop di Tiongkok, sejumlah acara - acara industri hiburan yang meliput dan melibatkan berbagai artis dan penyanyi Korea Selatan harus dibatalkan, sejumlah artis asal Korea Selatan yang masuk dan diberitakan oleh media Tiongkok harus di sensor wajahnya, serta penghapusan serta pembatalan *casting* dan audisi yang diikuti oleh sejumlah artis asal Korea Selatan yang ingin terlibat dalam berbagai produksi film dan tv series televisi China.²¹ Tidak hanya sampai disitu, sejumlah film - film besar yang melibatkan berbagai bintang asal Korea Selatan maupun yang terlibat dan terasosiasikan dengan industri hiburan Korea Selatan juga harus mengalami pembatalan produksi dan

¹⁹ Ibid

²⁰ Ruben Diaz, "Here's A Timeline Of China's Ban On Korean Entertainment", *Charactermedia.com*, 8 Desember 2016, <https://charactermedia.com/heres-a-timeline-of-chinas-ban-on-korean-entertainment/>, diakses pada 28 Maret 2021.

²¹ Ibid

penayangan film.²² Hal ini tentu saja menuai reaksi dari berbagai pihak, tak terkecuali sejumlah petinggi Korea Selatan yang kemudian menilai bahwa adanya kerjasama Korea Selatan dengan Amerika Serikat terkait dengan dikembangkannya *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) hanyalah merupakan alasan bagi Negara Tiongkok untuk secara sengaja memberlakukan pelarangan *hallyu* untuk berusaha mencegah perkembangan dari kesuksesan *hallyu* di Negara Tiongkok.²³ Hal ini dikatakan bukan tanpa alasan mengingat sejak tahun 2008, berkembangnya *hallyu* melalui *K-pop* mulai menjejakkan peruntungannya di Tiongkok dan menuai respons yang cukup baik. Ini dibuktikan dengan banyaknya anggota grup penyanyi *K-pop* yang tak jarang terlahir dari berbagai bagian di Negara Tiongkok.²⁴ Dari sisi dunia industri hiburan, tidak jarang baik industri hiburan maupun perfilman Tiongkok banyak yang mengambil berbagai ide maupun melakukan adaptasi dari berbagai acara pertelevisian maupun dari serial televisi asal Korea Selatan.²⁵

Dengan diberlakukannya kebijakan pelarangan *hallyu* sendiri juga mempengaruhi bukan hanya perekonomian Korea Selatan mengingat Tiongkok merupakan salah satu konsumen *hallyu* terbesar bagi pasar Korea Selatan melainkan

²² Kim Jae Heun, "China's ban shifting hallyu to Southeast Asia", *Koreatimes.co.kr*, 2 Februari 2017, http://www.koreatimes.co.kr/www/art/2017/02/688_223171.html, diakses pada 28 Maret 2021.

²³ Editorial The Korea Times, "China's ban on hallyu", *Koreatimes.co.kr*, 23 November 2016, http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/2016/11/202_218799.html, diakses pada 28 Maret 2021.

²⁴ Lauren Teixeira, "K-Pop's Big China Problem Chinese stars are spinning off in their own orbit as politics gets in the way of profit", *Foreignpolicy.com*, 30 Juli 2019, <https://foreignpolicy.com/2019/07/30/k-pops-big-china-problem/>, diakses pada 28 Maret 2021.

²⁵ Ai Yan, "Why do Chinese remakes of foreign TV drama always flop?", *News.cgtn.com*, 23 September 2020, <https://news.cgtn.com/news/2020-09-23/Why-do-Chinese-remakes-of-foreign-TV-drama-always-flop--U1mf9pVx8A/index.html>, diakses pada 28 Maret 2021.

juga minat masyarakat Tiongkok yang sudah terlalu menggemari dan menikmati musik, film, serial televisi, dan juga acara televisi asal Korea Selatan. Besarnya minat masyarakat Tiongkok tersebut kemudian membuat dan mempengaruhi arah dari pemberlakuan kebijakan pelarangan *hallyu* di Negara Tiongkok. Hal ini terlihat dari berbagai kelonggaran yang mulai diberlakukan dan dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap serial televisi Korea Selatan yang secara perlahan mulai diperbolehkan untuk masuk dalam beberapa aplikasi *streaming* milik Tiongkok seperti *iQIYI* dan *Youku* yang juga merupakan dua aplikasi *streaming* terpopuler di Tiongkok yang juga merambah ke berbagai negara di luar Tiongkok.²⁶ Adanya kelonggaran pelarangan *hallyu* yang ditandai dengan diperbolehkannya serial televisi asal Korea Selatan yang kembali ditayangkan di Tiongkok yang membuat kebijakan ini memulai langkah awal perkembangannya yang mana dapat memungkinkan untuk pencabutan aturan pelarangan *hallyu* oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan. Adanya sejumlah kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok juga tidak luput dari berbagai usaha diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai bentuk usahanya mempertahankan *hallyu* sebagai instrumen diplomasi publik utama negara ginseng tersebut. Namun hingga saat ini hubungan kedua negara terkait kebijakan pelarangan *hallyu* sendiri masih bersifat menggantung dengan tidak adanya kejelasan bagaimana kebijakan pelarangan ini akan dihapuskan atau tidak kedepannya mengingat

²⁶ Hong Soon-do, "China Virtually Ends Hallyu Ban", *Huffpost.com*, 11 Februari 2017, https://www.huffpost.com/entry/china-virtually-ends-hallyu-ban_b_59fb14cae4b09afdf01c40a1 , diakses pada 28 Maret 2021.

pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan sejumlah kebijakan baru yang dinilai dapat membuat *hallyu* dapat masuk kembali ke pasar Tiongkok.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, fokus utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkembangan hubungan diplomasi antara Tiongkok dan Korea Selatan terkait kebijakan *hallyu ban* yang mulai diberlakukan dari tahun 2016.²⁷ Penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam memperjuangkan masuknya kembali *hallyu* ke dalam Negara Tiongkok. Upaya Korea Selatan dalam mengupayakan masuknya kembali *hallyu* ke dalam Negara Tiongkok sebagai bentuk keseriusan Korea Selatan dalam menggunakan *hallyu* atau *Korean wave* sebagai alat diplomasi publik Negara Korea Selatan. Penelitian ini diakhiri pada September 2021 yang dikarenakan tahun tersebut merupakan awal masuknya kembali film Tiongkok yang diperankan oleh artis Korea Selatan mulai dijadwalkan dapat ditayangkan kembali di Tiongkok dan diberlakukan kebijakan pemerintah Tiongkok yang dapat memicu pengetatan pelarangan *hallyu*.

²⁷ Ruben Diaz, "Here's A Timeline Of China's Ban On Korean Entertainment", *Charactermedia.com*, 8 Desember 2016, <https://charactermedia.com/heres-a-timeline-of-chinas-ban-on-korean-entertainment/>, diakses pada 28 Maret 2021.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana upaya diplomasi publik antara Korea Selatan dengan Tiongkok terkait dengan adanya perkembangan hubungan dari kebijakan pelarangan *hallyu*?”

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan terkait adanya pelarangan *hallyu* yang dijatuhkan oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan hubungan diplomasi publik yang terjalin antara Tiongkok dan Korea Selatan mengingat hubungan kedua negara tersebut sempat mengalami ketegangan dengan diberlakukannya kebijakan pelarangan *hallyu* oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan. Dengan melihat perkembangan *hallyu* dan upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan, penelitian ini juga dapat memperlihatkan apakah aturan pelarangan *hallyu* yang diciptakan oleh Tiongkok dapat dihapuskan atau tidak dimasa yang akan datang .

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi para pembaca diluar sana yang membutuhkan sumber - sumber akademik bagi para peneliti topik *hallyu* sebagai instrumen diplomasi kebudayaan (*cultural diplomacy*) yang merupakan bagian dari

diplomasi publik. Selain itu, penelitian ini berguna bagi para masyarakat yang ingin mengetahui tentang upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam menangani kebijakan pelarangan *hallyu* yang diciptakan oleh Tiongkok.

1.4 Kajian Literatur

Literatur pertama yang digunakan untuk penelitian ini adalah jurnal yang berjudul “ *The Big “Ban” Theory and Piracy: Which Way Forward For Effective Transnational Copyright Enforcement In China?*” yang ditulis oleh Tianxiang He. Literatur ini berusaha untuk memperlihatkan dan mengkaji kebijakan pelarangan Tiongkok yang dinilai memiliki cakupan yang terlalu luas dan tidak spesifik. Selain itu, literatur ini juga melihat kebijakan pelarangan *hallyu* oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan dari sisi kebijakan penegakan hak cipta transnasional. Hal ini dinilai dapat membantu melihat isu kebijakan pelarangan *hallyu* yang dijatuhkan oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan secara lebih jelas dan spesifik. Literatur ini juga membahas tentang sejumlah langkah yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menjalankan kebijakan larangan *hallyu* yang sangat bergantung pada minat ekspor kebudayaan Korea Selatan dan pelaksanaan kebijakan hak cipta yang dianut oleh industri hiburan Korea Selatan.²⁸

²⁸ Tianxiang, H. E, "The Big “Ban” Theory and Piracy: Which Way Forward for Effective Transnational Copyright Enforcement Policy in China?." *In 4th Asian IP Works-in-Progress Conference*, 2019, Hal 161 - 190, <https://ssrn.com/abstract=3490651> , diakses pada 4 April 2021.

Literatur ini mengutarakan tiga argumen utama yang muncul seiring dengan dilihatnya kebijakan pelarangan *hallyu* oleh Tiongkok dari sisi perlunya penegakan kebijakan hak cipta yang harus ditegakkan dan diaplikasikan oleh industri hiburan Korea Selatan di Tiongkok. Hal ini diusung bukan tanpa alasan mengingat Tiongkok juga memiliki sejarah panjang dalam hal membuat kebijakan yang melarang berbagai negara dalam hal - hal tertentu. Pada bagian pertama dari ketiga argumen utama artikel ini membahas mengapa industri hiburan Korea Selatan memerlukan pengakuan terhadap kebijakan hak ciptanya khususnya terhadap China. Selain karena melihat sisi historis Tiongkok yang memang kerap kali menjatuhkan kebijakan terhadap negara lain, hal ini juga terkait dengan kebijakan *copyright* dan pemboikotan yang dialami oleh sejumlah artis asal Korea Selatan yang harus terlibat dalam beberapa acara televisi Tiongkok maupun produk - produk industri hiburan lainnya seperti film dan acara hiburan televisi Tiongkok. Alasan berikutnya terkait industri hiburan Korea Selatan kerap kali mengalami masalah pembajakan yang dilakukan oleh industri hiburan milik Tiongkok dan tidak ada kebijakan perlindungan hak cipta yang cukup kuat untuk melindungi Korea Selatan dari hal tersebut. Hal itu dapat dilihat pada saat acara Korea Selatan disiarkan secara ilegal dan tidak resmi di berbagai situs asal Tiongkok. Sebagai bentuk tindakan respons Korea Selatan kemudian mengajak pemerintah Tiongkok untuk menciptakan aturan perundang - undangan yang lebih rigid sehingga industri hiburan Korea Selatan dapat mendapatkan perlindungan yang lebih ketat di China. Kebijakan ini dikenal dengan nama “*The Content Industry Promotion Act*” dan “*The Music Industry Promotion Act*” yang disahkan dan diamandemen pada Januari 2018.

Argumen kedua yang disampaikan oleh artikel ini adalah semakin berkembangnya *hallyu* dan ancaman yang muncul terkait dengan hak cipta di Tiongkok. Argumen ini didasari atas maraknya aksi pembajakan karya industri Korea Selatan yang terjadi di Tiongkok akibat adanya kebijakan Tiongkok yang memlimitasi jumlah produk kebudayaan yang boleh diimpor oleh negara lain ke Tiongkok. Argumen ketiga adalah dampak dari diberlakukannya kebijakan pelarangan *hallyu* di Tiongkok yang menyebabkan penurunan minat *hallyu* di Tiongkok serta masalah *copyright* yang menimpa *hallyu* di Tiongkok. Tiongkok memiliki sistem *copyright* yang sangat ketat sehingga tak jarang jumlah produk *hallyu* yang mampu masuk ke pasar Tiongkok sangatlah sedikit dan *hallyu* juga masih harus bersaing dengan produk asing seperti film *hollywood*. Hal ini membuat pembajakan dan pemutaran ilegal tanpa izin menjadi sangat marak dilakukan terhadap *hallyu*.²⁹

Literatur kedua berjudul ***“Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea’s Soft Power Success and China’s Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System Deployment”*** yang ditulis oleh Hannah Jun. Artikel ini berisikan tentang perkembangan dan kesuksesan *hallyu* selama dua abad terakhir. Selain itu, literatur ini juga membahas tentang awal dari pecahnya ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dengan Korea Selatan akibat disetujuinya kebijakan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) oleh Korea Selatan. Kesuksesan *hallyu* pada artikel ini dikaji melalui pendekatan neoliberal, perspektif kebudayaan *hybrid*, serta

²⁹ Ibid

melalui pendekatan nasionalis.³⁰ Literatur ini juga mengkaji arah keberhasilan *hallyu* di masa yang akan datang. Argumen utama yang terdapat dalam artikel ini adalah adanya *security dilemma* yang terjadi dalam hubungan Tiongkok dengan Korea Selatan akibat adanya usungan Amerika Serikat yaitu *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Dengan langkah Korea Selatan yang menyetujuinya dilaksanakannya program ini maka tindakan Tiongkok yang semakin ingin mengurangi jumlah impor *hallyu* ke dalam negaranya semakin terpenuhi.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dinilai sebagai alasan yang sangat logis bagi Tiongkok yang ingin mengurangi impor *hallyu* dari Korea Selatan, pasalnya sebelum disetujui program tersebut, pemerintah Tiongkok telah berupaya untuk mengubah jam tayang sejumlah acara dan serial televisi Korea Selatan yang memperoleh izin penayangan di Tiongkok. Hal ini dilakukan karena Tiongkok melihat minat masyarakat Tiongkok terhadap *hallyu* yang terus meningkat. Dengan dijatuhkannya kebijakan pelarangan *hallyu* juga secara tidak langsung membantu perkembangan sentimen Anti - Korea yang berkembang di masyarakat Tiongkok.³¹

Literatur terakhir ditulis oleh Ji Young Lee dengan judul “ *The Geopolitics of South Korea–China Relations: Implications for U.S. Policy in the Indo-Pacific*” membicarakan tentang hubungan Tiongkok dan Korea Selatan yang dibagi kedalam

³⁰ Hannah Jun, "Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea's Soft Power Success and China's Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) System Deployment." *Asian International Studies Review* 18, no. 1 (2017): 153-169. DOI: <http://dx.doi.org/10.1163/2667078X-01801008> , diakses pada 4 April 2021.

³¹ Ibid. 153 - 169

beberapa fase. Fase pertama dimulai pada tahun 1950 - 1992, fase kedua pada tahun 1992 - 2008 yang merupakan awal dari terjalinnya hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan Korea Selatan dibawah kepemimpinan Presiden Deng Xiao Ping, fase ketiga dimulai dari tahun 2008 - 2013 , dan fase terakhir dimulai sejak tahun 2013 - 2020 dimana menjadi fokus utama bagi Peneliti dimana pada fase ini, berbagai peristiwa krusial dalam penelitian ini mulai dibahas yaitu masa dimana terjadi berbagai pertemuan terkait bidang militer baik dari sisi Korea Selatan maupun Tiongkok hingga Amerika Serikat. Selain itu pada masa ini juga menandakan dimulainya program usungan Amerika Serikat yaitu *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* yang kemudian disetujui diikuti oleh Korea Selatan dan ditentang oleh Tiongkok.³²

Melihat adanya ketegangan dan ketegangan yang terjadi pada fase keempat hubungan diplomasi Korea Selatan dan Tiongkok, literatur ini juga mencantumkan berbagai usaha yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In dan Tiongkok agar kerja sama yang sudah terjalin sejak tahun 1992 tidak berakhir begitu saja. Kebijakan yang dikenal dengan nama *Three NO's* usungan Moon Jae In juga kembali dibahas dalam jurnal ini. Kebijakan yang diciptakan oleh Moon Jae In inilah yang kemudian dinilai berhasil untuk meredakan kecemasan dan kegusaran Tiongkok terhadap program *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*, dimana kecemasan Tiongkok muncul karena merasa posisinya terancam dengan adanya aliansi yang terbentuk antara

³² Ji-Young Lee, "The Geopolitics of South Korea–China Relations: Implications for U.S. Policy in the Indo-Pacific", Santa Monica, CA: RAND Corporation, November 2020. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA524-1.html> ., diakses pada 6 April 2021.

Amerika Serikat dengan Korea Selatan melalui program ini. Selain itu Korea Selatan juga tidak akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam membuat aliansi militer baru bersama Jepang dan tidak akan ikut dalam pengembangan rudal dengan Amerika Serikat. Hal ini memulai keberhasilan bagi kembali baiknya hubungan diplomasi yang terjalin antara Tiongkok dengan Korea Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dibawah era kepresidenan Moon Jae In dalam menangani hal ini akan mengalami beberapa penyesuaian yang tidak akan membuat hubungan yang terjalin oleh baik Tiongkok - Korea Selatan maupun Amerika Serikat - Korea Selatan menjadi retak.³³

Ketiga literatur ini memiliki beberapa peran dalam membantu terlaksananya penelitian yang diusung oleh Penulis. Ketiga literatur yang dipilih oleh penulis juga memiliki beberapa pandangan yang dapat membantu penulis melihat ada – tidaknya kesamaan dan perbedaan pandangan dengan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Kesamaan pandangan yang juga ditemukan pada penelitian ini terlihat dalam literatur milik Hannah Jun yang berjudul *“Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea’s Soft Power Success and China’s Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System Deployment”* yang juga melihat bagaimana Tiongkok dengan agenda pengembangan kebudayaan lokalnya sendiri dengan sengaja mencari celah melalui pelarangan *hallyu* untuk mengurangi minat masyarakat Tiongkok terhadap *hallyu* dengan adanya temuan penulis yang juga

³³ Ibid

menemukan sejumlah niat dan langkah pemerintah Tiongkok yang ingin mengembangkan hasil kebudayaan negaranya sendiri dan melihat *hallyu* sebagai kompetitor. Maka, dengan adanya temuan ini, pandangan penulis dengan literatur kedua yang ditulis oleh Hannah Jun terkait bagaimana pemerintah Tiongkok secara tidak langsung menjatuhkan kebijakan pelarangan *hallyu* sebagai celah bagi pemerintah Tiongkok untuk mengurangi minat masyarakat Tiongkok terhadap *hallyu* dan ingin menambah ketertarikan dan minat masyarakat Tiongkok terhadap pertelevisian dan industri film nasional dapat dinilai sama. Hal ini juga dituangkan dalam tulisan Hannah Jun yang mengungkap bagaimana langkah pemerintah Tiongkok dalam mengurangi minat masyarakat Tiongkok terhadap *hallyu*, yaitu dengan memberlakukan perubahan jam tayang bagi acara hiburan Korea Selatan serta secara tidak langsung juga mendukung kampanye Anti - Korea yang ada Tiongkok guna mendukung kebudayaan dan pertelevisian Tiongkok.³⁴

Pada Jurnal Jurnal yang ditulis oleh Tianxiang H.E memberikan sejumlah informasi terkait bagaimana kebijakan pelarangan *hallyu* dijatuhkan oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan dengan melihat kebijakan pelarangan *hallyu* dari sisi historis. Secara historis yang ditulis dalam literatur ini, Tiongkok kerap kali menjatuhkan sejumlah larangan yang bersifat tidak eksplisit seperti kebijakan pelarangan *hallyu* yang sesuai dengan adanya temuan penulis akan pemerintah Tiongkok yang memang

³⁴ Hannah Jun, "Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea's Soft Power Success and China's Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) System Deployment." *Asian International Studies Review* 18, no. 1 (2017): 153-169. DOI: <http://dx.doi.org/10.1163/2667078X-01801008> , diakses pada 4 April 2021.

tidak pernah mengakui penjatuhan sanksi pelarangan *hallyu* terhadap Korea Selatan. Selain itu literatur ini juga membahas mengenai *illegal streaming* konten - konten *hallyu* di Tiongkok yang dinilai tetap memberikan pemasukan bagi para produsen konten - konten *hallyu* seperti serial televisi walaupun kebijakan *hallyu* dijatuhkan oleh pemerintah Tiongkok. Namun Tiangxiang H.E juga berargumen bahwa pemasukan yang didapatkan tidak dapat didistribusikan secara merata sehingga dilonggarkan atau dicabutnya kebijakan pelarangan ini masih sangat dibutuhkan.³⁵ Pandangan penulis berdasarkan temuan yang didapatkan dalam penelitian ini berbeda dengan apa yang ditulis dalam jurnal milik Tiangxiang H.E jika dilihat dari bagaimana upaya dan langkah pemerintah Korea Selatan dalam memperjuangkan pasar ekspor – impor baru untuk *hallyu* agar dapat terus berkembang dan membantu Korea Selatan dalam menjalankan kepentingan kebijakan luar negerinya.

Literatur terakhir yang ditulis oleh Ji Young Lee juga bermanfaat untuk melihat bagaimana upaya Korea Selatan dibawah kepresidenan Presiden Moon Jae In dalam mengatasi kebijakan pelarangan *hallyu* juga dalam meredam ketegangan yang terjadi antara Tiongkok - Korea Selatan. Selain itu karena literatur ini ingin melihat perkembangan hubungan kedua negara di masa depan, maka jurnal ini juga berfungsi untuk menjawab identifikasi masalah penelitian ini yang ingin melihat kemungkinan kebijakan pelarangan *hallyu* untuk dihapuskan. Untuk menjawab hal ini, literatur ini

³⁵ Tianxiang, H. E, "The Big "Ban" Theory and Piracy: Which Way Forward for Effective Transnational Copyright Enforcement Policy in China?." *In 4th Asian IP Works-in-Progress Conference*, 2019, Hal 161 - 190, <https://ssrn.com/abstract=3490651> , diakses pada 4 April 2021.

memperlihatkan bagaimana interdependensi ekonomi yang dimiliki oleh Korea Selatan terhadap Tiongkok sebagai pasar ekspor besar bagi Korea Selatan. Selain itu, literatur ini juga memaparkan perspektif lain yaitu adanya kesamaan perspektif yang dianut oleh kedua negara. Kedua hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi kedua negara untuk tetap berhubungan baik. Terjalannya hubungan baik inilah yang akan menjawab kemungkinan kebijakan pelarangan *hallyu* untuk dihapuskan atau tidak.³⁶ Hasil penelitian yang membuktikan bagaimana Korea Selatan mulai mengembangkan pasar ekspor – impor *hallyu* ke regional dan negara lain sebagai upaya untuk mengurangi dependensi ekonomi dengan Tiongkok menjadi berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan dalam literatur yang ditulis oleh Ji Young Lee. Selain itu, upaya menjaga hubungan baik antar dua negara yang tertulis dalam jurnal ini perlu ditinjau kembali mengingat adanya langkah pemerintah Tiongkok sebagai bentuk temuan penelitian oleh penulis justru menciptakan sejumlah kebijakan yang dinilai mempersulit *hallyu* untuk masuk kembali di Tiongkok.

1.5 Kerangka Teori

Diplomasi merupakan hubungan dan interaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara - negara lainnya dimana dalam diplomasi juga meliputi kegiatan negosiasi, diskusi, maupun berbagai kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh negara

³⁶ Ji-Young Lee, “The Geopolitics of South Korea–China Relations: Implications for U.S. Policy in the Indo-Pacific”, Santa Monica, CA: RAND Corporation, November 2020. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA524-1.html> ., diakses pada 6 April 2021.

ke negara - negara lain. Diplomasi berperan sebagai wadah bagi negara untuk menentukan dan menjalankan kebijakan luar negerinya maupun sebagai tempat bagi berbagai negara untuk menjalin kerja sama dan aktivitas ekonominya.³⁷ Dengan semakin berkembangnya berbagai macam isu yang marak terjadi di dunia internasional, maka lahirlah beberapa cabang ilmu dari diplomasi dalam mengatur hubungan antara negara - negara di dunia. Selain itu, perkembangan teknologi dan media massa juga membuat diplomasi yang terjadi antara negara dengan negara lain tidak jarang menarik keterlibatan aktor - aktor dan instrumen diplomasi yang bersifat *low politics*.³⁸ Kemunculan dan keterlibatan aktor serta instrumen diplomasi yang bersifat *low politics* kemudian melahirkan cabang ilmu diplomasi yang dikenal dengan nama diplomasi publik.

Diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull adalah cara dan langkah dari berbagai aktor internasional yang melibatkan keterlibatan *foreign public* dalam memelihara dunia internasional guna melaksanakan kebijakan luar negeri suatu negara.³⁹ Kebijakan luar negeri merupakan keputusan dan langkah yang dilakukan oleh negara sebagai aktor negara maupun aktor non negara seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan aktor - aktor transnasional lainnya dalam

³⁷ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2007), hal 191 - 192.

³⁸ Nathan Olsen, "Blurring the Distinction Between "High" and "Low" Politics in International Relations Theory: Drifting Players in the Logic of Two-Level Games", *International Relations and Diplomacy*, Vol. 5,

No. 10 (2017): hal 637-642 DOI: 10.17265/2328-2134/2017.10.005 , diakses pada 10 April 2021.

³⁹ Nicholas J. Cull, *Public diplomacy: Lessons from the past*, Los Angeles, CA: Figueroa Press, 2009, hal 17.

menjalankan interaksi dan menyelesaikan suatu hal dengan negara lain.⁴⁰ Dengan kemunculan aktor non negara sebagai pelaku kebijakan luar negeri, maka lahir juga *multistake-holders diplomacy* dimana pihak – pihak swasta yang tergolong sebagai aktor non negara dalam diplomasi seperti perusahaan multi nasional dapat menghasilkan langkah – langkah diplomasi yang berdasarkan interaksi yang terjadi di antara pemerintah, organisasi – organisasi non negara, serta sektor bisnis dalam pelaksanaannya.⁴¹ Konsep ini lahir sehubungan dengan kemunculan sektor bisnis dan perusahaan – perusahaan multi nasional sebagai aktor non negara diplomasi publik.⁴² Diplomasi publik dinilai mampu dilakukan dengan lebih efektif dibandingkan dengan memakai jenis - jenis diplomasi tradisional lainnya karena seiring dengan berkembangnya zaman, diplomasi publik dianggap lebih tepat untuk digunakan sebagai alat untuk membuka sejumlah peluang negosiasi dan kerjasama, memberikan kesempatan bagi para negara untuk menyampaikan pandangannya secara lebih praktis dan efisien, memenuhi kepentingan negara dan kebijakan luar negeri, serta membantu menyelesaikan isu - isu politik global yang tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi tradisional.⁴³ Berkembangnya penggunaan *soft power* dalam era globalisasi juga

⁴⁰ Paul R Viotti and Mark V Kauppi, *International Relations Theory*, 5th ed. (Boston: Longman, 2012), hal 40.

⁴¹ Steve Slavik, *Multistakeholder Diplomacy : Challenges and Opportunities*. (Malta ; Geneva: Diplo, 2006), hal 17.

⁴² Nicholas J. Cull, *Public diplomacy: Lessons from the past*, Los Angeles, CA: Figueroa Press, 2009, hal 17.

⁴³ Yohanes Santoso, “Penjelasan Singkat Tentang Jalur-jalur Diplomasi,” *Unair*, 1 Juni 2017, [http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175542-\(SOH203\)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Penjelasan%20Singkat%20tentang%20JalurJalur%20dalam%20Diplomasi.html](http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175542-(SOH203)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Penjelasan%20Singkat%20tentang%20JalurJalur%20dalam%20Diplomasi.html) , diakses pada 10 April 2021.

menjadi faktor utama semakin meluasnya penggunaan diplomasi publik bagi berbagai negara dunia untuk mencapai kepentingan nasional mereka. *Soft power* menurut Joseph Nye tercipta seiring dengan semakin maraknya penggunaan diplomasi publik dalam menyelesaikan berbagai isu internasional yang bersifat non tradisional.⁴⁴ Konsep *soft power* juga melibatkan berbagai nilai - nilai kebudayaan dalam pelaksanaannya. Kegiatan diplomasi publik dengan melibatkan kebudayaan sebagai *soft power* suatu negara juga kerap kali disponsori oleh pemerintah.⁴⁵ Tujuan dilakukannya diplomasi publik adalah untuk membentuk opini positif masyarakat negara lain terhadap negara asal (negara pelaku diplomasi publik) dan mengoptimalkan aktivitas komunikasi internasional untuk mencapai kepentingan negara.⁴⁶ Selain itu, dalam pelaksanaan diplomasi publik, *soft power* juga kerap kali digunakan oleh sebuah negara sebagai bentuk *nation brand* yang membantu negara untuk memperluas pengaruh dan kekuatannya dalam dunia internasional yang terdapat dalam kegiatan publik diplomasi baru.⁴⁷

⁴⁴ Joseph Nye, "Public Diplomacy and Soft Power," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 616, No.1 (2008): hal 95, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716207311699> , diakses pada 10 April 2021.

⁴⁵ Yohanes Santoso, "Penjelasan Singkat Tentang Jalur-jalur Diplomasi," *Unair*, 1 Juni 2017, [http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175542-\(SOH203\)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Penjelasan%20Singkat%20tentang%20JalurJalur%20dalam%20Diplomasi.html](http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175542-(SOH203)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Penjelasan%20Singkat%20tentang%20JalurJalur%20dalam%20Diplomasi.html) , diakses pada 10 April 2021.

⁴⁶ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 191 -192

⁴⁷ Nicholas J. Cull, *Public diplomacy: Lessons from the past*, Los Angeles, CA: Figueroa Press, 2009, 19.

Dalam pelaksanaan diplomasi publik terdapat langkah yang disebut sebagai instrumen diplomasi publik. Instrumen - instrumen ini yang membantu pelaksanaan diplomasi publik agar dapat mencapai kepentingan nasional yang ingin dipenuhi oleh suatu negara. Instrumen pertama yang terdapat dalam diplomasi publik adalah *cultural diplomacy* atau diplomasi kebudayaan. *Cultural diplomacy* merupakan upaya dan langkah pemerintah negara tersebut untuk membuat produk - produk kebudayaan yang dimiliki tersebut dapat diperkenalkan dan disebarluaskan ke luar negeri.⁴⁸ *Cultural diplomacy* sendiri memang memiliki kewajiban tetap untuk mengembangkan nilai ekspor kebudayaan dari suatu negara ke pasar internasional.

Instrumen berikutnya adalah *exchange diplomacy*. *Exchange diplomacy* adalah langkah diplomasi publik yang memiliki kebijakan untuk mengirimkan warga negaranya untuk menjalani studi maupun kegiatan akulturasi yang harus dilakukan oleh pemerintah negara tersebut secara dua arah.⁴⁹ Maka sifat dari pelaksanaan *exchange diplomacy* bersifat dua arah dimana negara bukan saja mengirimkan warga negaranya ke luar negeri maupun negara juga harus mau menerima warga negara asing yang datang dari negara penerima ke dalam negara pengirim yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu. Instrumen ketiga dalam diplomasi publik adalah *international broadcasting*. *International broadcasting* merupakan upaya negara maupun aktor diplomasi untuk menjaga dan mengelola eksistensinya dalam dunia internasional dengan melibatkan serta memanfaatkan sumber - sumber teknologi seperti internet dan

⁴⁸ Ibid, 19-20.

⁴⁹ Ibid, 20

media di dalam pelaksanaannya.⁵⁰ Teknologi dan berbagai kantor media menjadi instrumen penting dalam menjembatani langkah sebuah negara dengan berbagai negara asing bahkan dunia internasional.

Instrumen keempat adalah *advocacy*. *Advocacy* dapat diartikan sebagai upaya aktor diplomasi publik untuk terus mengelola dan mengembangkan komunikasi internasional yang sudah terjalin serta secara aktif, terus menyampaikan berbagai ide kebijakan maupun kepentingan internasional yang hendak dicapai oleh negara tersebut.⁵¹ *Advocacy* juga dapat dilakukan untuk menjaga perdamaian karena cenderung membahas isu - isu dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *soft approach*. Instrumen berikutnya adalah *listening*. *Listening* merupakan upaya negara dalam mendengarkan masukan, opini, dan juga pandangan negara - negara asing guna membentuk sebuah pedoman dasar bagi negara dalam memelihara relasi dan pelaksanaan diplomasi publik dengan negara lain. Selain itu *listening* juga berarti negara juga akan melakukan kegiatan pendataan pandangan dan opini yang berikutnya dapat dirumuskan sebagai bentuk pedoman dasar tersebut.⁵² Instrumen terakhir dalam diplomasi publik adalah *psychological welfare*. *Psychological welfare* merupakan kegiatan diplomasi publik dimana aktor diplomasi tersebut akan berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya dengan cara menjalin komunikasi dengan musuh yang dimiliki oleh negara lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyerahan diri yang

⁵⁰ Ibid, 21-22.

⁵¹ Nicholas J. Cull, *Public diplomacy: Lessons from the past*, Los Angeles, CA: Figueroa Press, 2009, 18 -19.

⁵² Ibis, 18.

dilakukan oleh aktor diplomasi kepada pihak lawan dalam sebuah peperangan maupun propaganda yang ada.⁵³

Untuk menganalisis dan melihat upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan terkait dijatuhkannya pelarangan *hallyu* oleh Tiongkok, maka instrumen diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull yang akan digunakan adalah *cultural diplomacy*, *advocacy*, dan *international broadcasting*. Ketiga elemen ini dipilih sebagai jenis elemen - elemen yang paling cocok untuk melihat upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan terkait diberlakukannya pelarangan *hallyu* oleh Tiongkok.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa fakta dan realitas yang ada. Penelitian kualitatif menurut John W. Creswell merupakan penelitian yang didalamnya menganalisa data yang ditemukan guna menjawab topik penelitian yang ada serta menginterpretasi hasil analisis data.⁵⁴

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur menurut Hannah Snyder yang dilakukan dengan cara dengan melihat dan mengkaji dua variabel guna melihat dan mengidentifikasi argumen serta asumsi yang

⁵³ Ibid, 22-23.

⁵⁴ John W Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2014), 4.

ditemukan dalam penelitian yang sedang berlangsung.⁵⁵ Data sekunder yang akan diteliti dapat berasal dari buku, jurnal, artikel, serta portal berita maupun *website* resmi pemerintahan yang mampu menunjang dilaksanakannya penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bagian. Bab 1 membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan, serta sistematika pembahasan. Bab 2 membahas perkembangan dan usaha diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan terkait hubungan diplomasi yang terjalin dengan Tiongkok dengan kemunculan pelarangan *hallyu* dan hubungan diplomasi pasca munculnya ketegangan yang terjadi dengan adanya program *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* yang disetujui oleh Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Bab 3 mengkaji dan menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap dalam mengupayakan diberhentikannya kebijakan pelarangan *hallyu* oleh pemerintah Tiongkok dan strategi pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi pelarangan tersebut. Selain itu pada bab ini juga membahas perkembangan kebijakan pelarangan *hallyu* di Tiongkok dengan melihat sejauh mana masyarakat Tiongkok dapat mengakses konten - konten *hallyu* guna melihat

⁵⁵ Hannah Snyder. "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines", *Journal of Business Research*, no.104 (2019): 333-339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>, diakses pada 11 April 2021.

kemungkinan pelarangan *hallyu* dapat dihapuskan atau tidak. Bab 4 berisikan kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini serta melihat apakah penelitian mampu menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis.

